



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

**Ringkasan
Eksekutif**



**KEMISKINAN
DI KABUPATEN
SEMARANG**

Ringkasan Eksekutif Kemiskinan Kabupaten Semarang 2018

ISBN :
Nomor Publikasi :
Katalog : **3205026.3322**
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : vii + 15 halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Semarang

Desain Sampul:
BPS Kabupaten Semarang

Diterbitkan oleh:
BPS Kabupaten Semarang

Dicetak oleh:

-

Sumber Gambar:
Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

**Tim Penyusun
Ringkasan Eksekutif
Kemiskinan Kabupaten Semarang 2018**

Pengarah : Tina Wahyufitri S.Si, M.Si
Penanggung jawab : Meryanti Sri Wulandari SST, M.Si.
Penyusun : Wiji Nograho, SST, M.Si
Sampul : Wiji Nograho, SST, M.Si

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun menyajikan data kemiskinan secara makro. BPS Kabupaten Semarang dalam publikasi ini menyajikan data kemiskinan makro suatu Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Semarang untuk tahun data 2018.

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator kemiskinan makro di Kabupaten Semarang, yaitu garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan kualitas kemiskinan. Selain itu juga disajikan penjelasan teknis dan teori yang berkaitan dengan kemiskinan.

Kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif terhadap publikasi ini sangat diharapkan bagi penyajian di masa mendatang.

Ungaran, 30 Juli 2020
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Semarang
Kepala

Tina Wahyufitri

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	2
Sumber Data	2
Penjelasan Teknis dan Teori	2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	5
Perkembangan Garis Kemiskinan	6
Perkembangan Indeks Kemiskinan	7
Karakteristik Penduduk Miskin	9
Referensi	15

Daftar Tabel

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan yang Ditamatkan	9
Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Status Bekerja	10
Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Sektor Bekerja	11
Tabel 4. Persentase Pengeluaran Per Kapita pada Kelompok 40 Persen Terbawah	11

Daftar Gambar

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018	5
Gambar 2. Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018	6
Gambar 3. Indeks Kemiskinan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018	8
Gambar 4. Komposisi Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Semarang, 2018	11
Gambar 5. Persentase Kemiskinan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2010-2018.....	14

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Pengukuran kemiskinan yang akurat dan dapat dipercaya merupakan instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi.

Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan informasi kemiskinan dan sejak tahun 2003 dapat disajikan setiap tahun. Sampai tahun 1987 informasi kemiskinan hanya disajikan untuk tingkat nasional dan sejak tahun 1990 dapat disajikan sampai tingkat provinsi, meskipun beberapa provinsi masih digabung.

Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi kemiskinan sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Karena keterbatasan sampel Susenas Modul Konsumsi, selanjutnya BPS menyajikan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota dengan Susenas KOR dan baru menggunakan data Susenas Modul

Konsumsi sejak tahun 2008. Kemiskinan yang disajikan BPS yang bersumber dari data Susenas tersebut merupakan data kemiskinan makro, artinya data kemiskinan yang hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi. Kemiskinan makro, tidak dapat menunjukkan “siapa” dan “dimana” penduduk miskin.

Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan berbagai indikator kemiskinan di Kabupaten Semarang kondisi tahun data 2018. Selain itu juga bertujuan untuk mempublikasikan salah satu hasil kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan makro Kabupaten Semarang. Beberapa pokok bahasan yang disajikan meliputi; garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan kualitas kemiskinan. Ukuran kualitas kemiskinan dalam publikasi ini menggunakan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018.

Penjelasan Teknis dan Teori

Definisi dari kemiskinan sendiri sangat beragam. Amartya Sen (1983) memperkenalkan konsep kemiskinan sebagai kapabilitas personal, seseorang harus mempunyai sumber daya yang memadai untuk mencapai/ menjalankan seperangkat fungsinya sebagai manusia dalam hidup dan kehidupannya.

Artkinson dan Bourguignon (1999) kemiskinan sebagai ketidakcukupan kekuatan untuk mengakses sumber daya ekonomi.

Definisi umum dari berbagai ahli adalah kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimum diantaranya makanan dan nonmakanan. Atau seseorang yang miskin adalah mereka dengan ciri 4L (*the last, the least, the lost, and the lowest*). Mempunyai kesempatan paling akhir mengakses sumber daya (*last*), paling sedikit menerima sumber daya (*least*), paling sedikit berpartisipasi dalam masyarakat bahkan cenderung hilang tidak berkontribusi atau merasa rendah sehingga tidak memiliki arah kehidupan yang jelas (*lost*), paling bawah dalam kelompok masyarakat (*lowest*).

Nilai makanan dan nonmakanan di atas kemudian diperkirakan menjadi sejumlah uang (diuangkan). Karena akan lebih mudah diukur, lebih jelas untuk perbandingan sekaligus berkorelasi kuat dengan dengan *nonmonetary variable* seperti variabel sosial budaya.

Untuk kategori kebutuhan makanan disesuaikan dengan kesepakatan widya pangan nasional yang sejalan dengan kesepakatan dunia dalam pertemuan di Roma tahun 2001, FAO dan WHO yang merekomendasikan kebutuhan untuk mampu bertahan hidup dan mampu bekerja adalah sekitar 2100 kkal plus kebutuhan dasar nonmakanan.

Sehingga, hasil survei UNSD 2005 menunjukkan 50 persen dari 84 negara menggunakan pendekatan kalori dalam pengukuran kemiskinan, 30 persen pendekatan pendapatan dan sisanya metode kombinasi.

Dalam perkembangannya *WorldBank* memunculkan ukuran kemiskinan dalam \$ PPP. Perlu diketahui bahwa \$ PPP

bukan nilai yang menggambarkan kurs mata uang, namun merupakan ukuran untuk keterbandingan yang adil dan setara dengan adanya nilai PPP yang mempertimbangkan biaya hidup yang bervariasi.

Di Indonesia, data kemiskinan yang lengkap secara makro dan sesuai pengukuran di atas bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Total sampel unit analisis adalah mencapai kurang lebih 340.000 rumah tangga (Maret) untuk estimasi nasional. Sampel di tingkat Kabupaten Semarang sebanyak 800 rumah tangga. Dari sini muncul beberapa ukuran diantaranya, Garis Kemiskinan (GK), Persentase Kemiskinan (PO), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

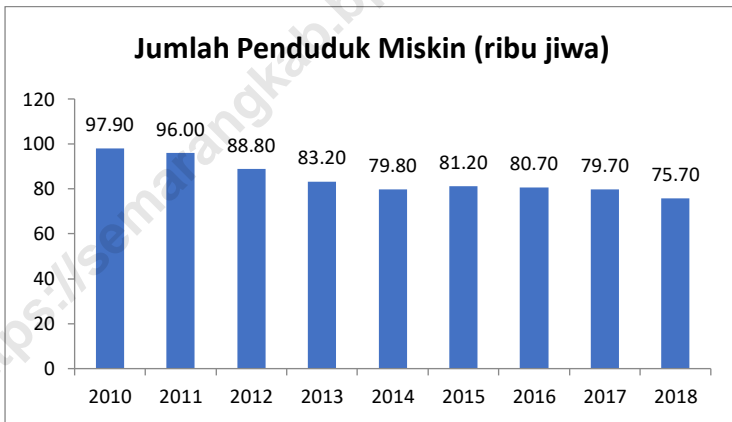
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Secara ringkasnya $GK = GKM + GKNM$.

Selanjutnya definisi dari beberapa ukuran kemiskinan lainnya. Persentase Kemiskinan (*Head Count Index-P0*) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018

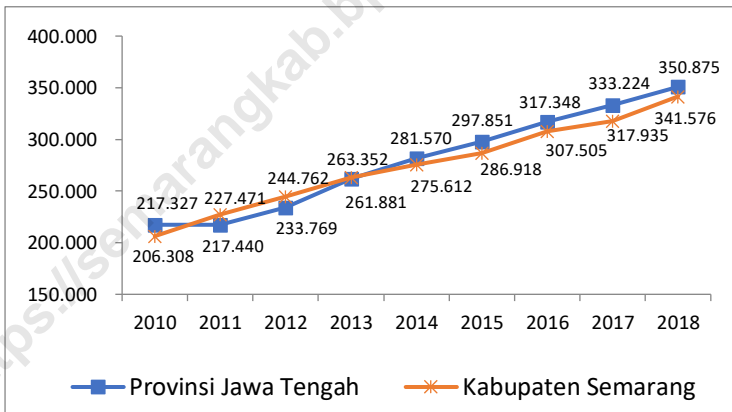
Selama periode tahun 2010 hingga 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang terus mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada gambar 1 yang menunjukkan pada tahun 2010 tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 97,90 ribu jiwa. Hingga tahun 2018 jumlah penduduk miskin

mengalami penurunan sebanyak 22,20 ribu jiwa menjadi 70,70 ribu jiwa penduduk miskin.

Jika dilihat lebih jauh, terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 ke tahun 2015. Kenaikan ini diduga terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang secara tidak langsung mengakibatkan kenaikan berbagai bahan pokok.

Sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi dalam satu tahun tercatat mencapai 5,60 ribu jiwa pada tahun 2012 ke tahun 2013. Namun secara umum selama periode tahun 2010 ke tahun 2018 grafik jumlah penduduk miskin menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Perkembangan Garis Kemiskinan



Gambar 2. Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pengukuran tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan data hasil Susenas. Kemudian, pengukuran pengeluaran rumah tangga menghasilkan suatu ukuran untuk menentukan rumah tangga tersebut masuk dalam kategori

miskin atau tidak. Ukuran inilah yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK).

GK sangat bervariasi untuk setiap wilayah. Sebagai contoh, GK Provinsi Jawa Tengah akan berbeda dengan GK Kabupaten Semarang. Pada gambar 2 sebelumnya, terlihat bahwa GK Provinsi Jawa Tengah dan GK Kabupaten Semarang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa standar seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak miskin semakin meningkat antar tahun.

Selama tahun 2010 hingga 2018 GK di Kabupaten Semarang meningkat sekitar sebesar 135 ribu rupiah. Sedangkan untuk GK Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar kurang lebih 116 ribu rupiah.

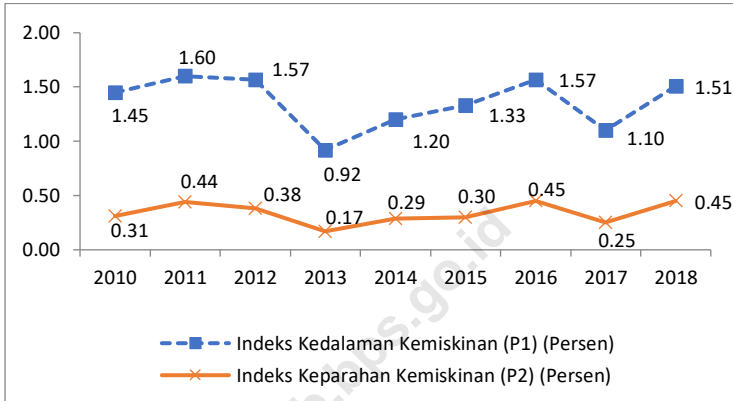
Namun demikian, sejak tahun 2014 hingga 2018 GK Kabupaten Semarang selalu berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan standar seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tidak miskin di Kabupaten Semarang sedikit lebih rendah jika dibandingkan kondisi umum di Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan Indeks Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Seperti terlihat pada gambar 3, bahwa pada periode 2010-2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Semarang terlihat fluktuatif. Nilai

P1 tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni dengan nilai indeks 1,60, sedangkan P1 terendah tercatat pada tahun 2013 yakni dengan nilai indeks 0,92.



Gambar 3. Indeks Kemiskinan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2018

P1 pada gambar 2 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2010 hingga 2012 penduduk miskin cenderung tidak mengalami perubahan posisi pengeluaran jika dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2013 dengan nilai P1 terendah menunjukkan bahwa pada tahun ini posisi pengeluaran penduduk miskin jika dibandingkan dengan garis kemiskinan adalah paling dekat. Atau dengan kata lain peluang terbesar penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan terjadi pada tahun 2013 dengan nilai P1 terendah atau paling dekat dengan garis kemiskinan.

Namun demikian, P1 kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin kembali menjauh turun lebih dalam dibandingkan garis kemiskinan.

Selanjutnya terkait indeks keparahan kemiskinan (P2), nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2018 dengan nilai indeks P2 sebesar 0,45. Sedangkan nilai indeks P2 terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai P2 sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat ketimpangan diantara penduduk miskin itu sendiri paling merata terjadi pada tahun 2013.

Jika P1 digabungkan dengan P2, dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin di tahun 2013 paling mendekati dengan garis kemiskinan dan dengan tingkat ketimpangan diantara mereka paling rendah. Hal ini sejalan dengan kondisi di mana penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada periode tahun 2012 ke 2013. Namun demikian indeks P1 dan P2 kemudian kembali naik selama periode selanjutnya. Demikian juga untuk jumlah penduduk miskin, walaupun secara tren menurun namun penurunannya mengalami perlambatan.

Karakteristik Penduduk Miskin

Melihat penduduk miskin dengan lebih detil terkait karakteristik penduduk miskin akan membantu pengambilan keputusan agar lebih fokus dalam menuntaskan kemiskinan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk miskin di Kabupaten Semarang yang berusia 15 tahun ke atas didominasi dengan mereka yang berpendidikan tamat SD atau tamat SLTP.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan yang Ditamatkan

Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLTP	Tamat SLTA dan lebih
(1)	(2)	(3)
26,11	49,18	24,70

Berdasarkan tabel 1 di atas, masih ada penduduk miskin yang berpendidikan SLTA atau lebih. Hal ini merupakan salah satu informasi penting untuk menyusun kebijakan pemerintah selanjutnya.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Status Bekerja

Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)
38,40	38,56	23,04

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas dan Sektor Bekerja

Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Bukan Pertanian	Bekerja di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)
38,40	6,04	55,56

Tabel 2 dan Tabel 3 memberikan informasi mengenai karakteristik penduduk miskin berdasarkan kegiatan dan pekerjaannya. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas tidak bekerja (38,40 persen) dan mereka yang bekerja di sektor informal (38,56 persen). Sisanya, sebanyak 23,04 persen bekerja di sektor formal.

Tabel 3 menunjukkan bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas didominasi mereka yang bekerja di sektor pertanian (55,56 persen).

Tabel 4. Persentase Pengeluaran Per Kapita pada Kelompok 40 Persen Terbawah

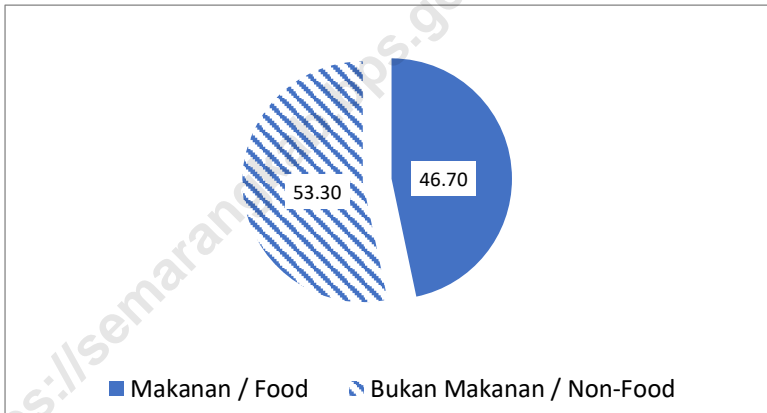
Komoditas	Persentase	Komoditas	Persentase
Padi-Padian	8,28	Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga	21,51
Umbi-Umbian	0,38	Aneka Barang dan Jasa	11,55
Ikan	2,27	Pakaian, Alas Kaki, Dan Tutup Kepala	3,03
Daging	1,63	Barang Tahan Lama	2,67
Telur dan Susu	3,73	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3,73
Sayur-Sayuran	5,79	Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	0,85
Kacang-Kacangan	2,08	Total Bukan Makanan	43,35
Buah-Buahan	2,94		
Minyak dan Kelapa	1,90		
Bahan Minuman	2,76		
Bumbu-Bumbuan	1,76		
Bahan Makanan Lainnya	1,44		
Makanan dan Minuman Jadi	16,53		
Rokok dan Tembakau	5,17		
Total Makanan	56,65		

Tabel 4, menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk menengah ke bawah (40 persen terbawah) didominasi oleh

pengeluaran makanan (56,65 persen) sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar 43,35 persen.

Pengeluaran makanan terbesar adalah kelompok makanan dan minuman jadi (16,53 persen), padi-padian (8,28 persen), sayur-sayuran (5,79 persen) dan rokok/tembakau sebesar 5,17 persen.

Sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga 21,51 persen dan aneka barang dan jasa pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar 11,55 persen.



Gambar 4. Komposisi Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Semarang, 2018

Selain kondisi dan karakteristik penduduk miskin sebagaimana digambarkan pada penjelasan sebelumnya, diperlukan juga kondisi dan gambaran penduduk dengan 40 persen tingkat pengeluaran terbawah atau penduduk kelas menengah. Selain itu pada gambar 4, dapat dilihat bagaimana

gambaran kondisi komposisi pengeluaran penduduk di Kabupaten Semarang pada tahun 2018.

Berdasarkan gambar 4, disimpulkan bahwa pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan. Jika dibandingkan pada tabel 4, hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk menengah ke atas menunjukkan tingkat kesejahteraan yang bagus. Hal ini sesuai dengan proksi pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan.

Perkembangan Persentase Kemiskinan

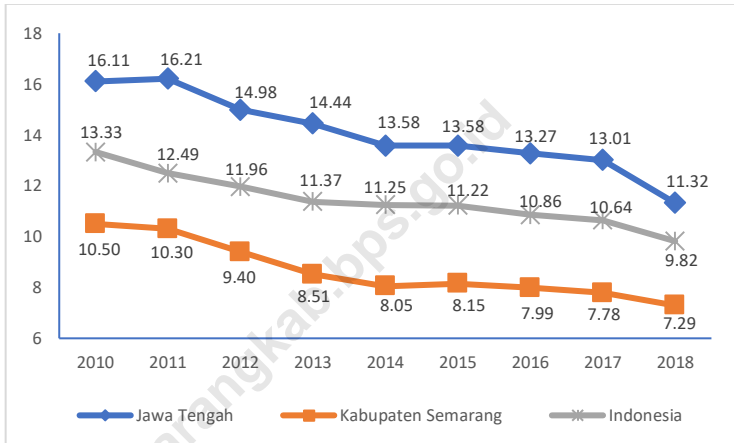
Dari berbagai indikator kemiskinan yang ada, persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menjadi fokus pemerintah. Dalam hal ini indikator persentase kemiskinan secara statistik diperoleh dari rumusan oleh Foster-Greer-Thorbecke (1984) yang diberikan simbol P0. P0 merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) dan disebut dengan *Head Count Index* (HCI-P0).

Gambar 5, menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang dari tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami tren menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penurunan kemiskinan memberikan hasil yang positif.

Bahkan jika dilihat perbandingan dari persentase kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang lebih rendah dibandingkan persentase Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Selama 2010 hingga 2018, di Kabupaten Semarang mengalami penurunan persentase kemiskinan sebesar 3,21 poin persen. Namun, penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Semarang tidak secepat penurunan persentase kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Hal ini

bisa dipahami karena penurunan persentase kemiskinan setelah di bawah 10 persen akan semakin melambat karena akan menemui kemiskinan yang mencapai akarnya atau sering disebut *hardrock poverty*. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan harus lebih dalam lagi dengan upaya lebih tajam khususnya kelompok miskin terbawah.



Gambar 5. Persentase Kemiskinan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2010-2018

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2019. Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2018. Yogyakarta: CV. Magna Raharja Tama (Mahata).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang 2018. Semarang: CV. Pelita.
- Hasbullah, Jousairi. 2012. Tangguh Dengan Statistik: Akurat Dalam Membaca Realita Dunia. Bandung: Nuansa Cendikia.
- <https://jateng.bps.go.id/dynamicstable/2019/01/29/93/persen-tase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2019.html>
- <https://jateng.bps.go.id/dynamicstable/2015/08/26/13/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-2006-2019.html>
- <https://jateng.bps.go.id/dynamicstable/2015/08/26/14/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota-2006-2019.html>
- <https://jateng.bps.go.id/dynamicstable/2017/04/13/46/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota-rupiah-1996-2019.html>
- <https://jateng.bps.go.id/dynamicstable/2015/09/08/20/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-1996-2019.html>